

KEPEMIMPINAN LAPIS DEPAN YANG ILMIAH DAN ALAMIAH

PENGANTAR.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mo-chammad Sanoesi, pada tanggal 16 Juni 1989, memberikan ceramah pembekalan bagi para Perwira Mahasiswa PTIK Angkatan XXIV/Wi-dya Prajaguptha yang akan diwi-suda di dalam acara puncak kegiat-an Dies Natalis PTIK ke 43 tanggal 17 Juni 1989, dengan judul: "Ke-pemimpinan Lapis depan Yang Ilmiah Dan Alamiah".

Ceramah tersebut merupakan penjabaran dari pada materi cera-mah pembekalan Pangab sebelun-nya pada para Perwira Mahasiswa di atas, yang memuat beberapa apresiasi strategik, ke dalam ling-kup yang lebih teknis, sifatnya ser-ta disesuaikan dengan beban tang-gung jawab yang akan dihadapi oleh para Perwira Mahasiswa tersebut nantinya di lapangan terutama di dalam mengemban tugas sebagai unsur pimpinan pada satuan-satuan Ujung Tombak Polri dilapis depan dan sekaligus berperan sebagai pem-bantu pimpinan pada lapis mene-ngah.

Penyuntingan dalam bentuk suatu karya tulis daripada materi naskah ceramah pembekalan Kapolri ini, se-mata-mata dimaksudkan sebagai peran serta aktif pengelola majalah Bhayangkara bagi memasyarakat-kan materi ceramah tersebut, se-

hingga di dalam jangka waktu yang relatif singkat mampu dimengerti, dihayati dan diamankan terutama bagi para perwira Polri yang mendu-duki posisi selaku unsur Pimpinan pada lapis depan.

PENDAHULUAN

1. Tuntutan dan Kualitas Pelaksa-naan Tugas

Kebijaksanaan dan strategi Op-timasi dan Dinamisasi yang telah ditetapkan Pimpinan Polri baik di bidang penyelenggaraan tugas, fungsi dan peranan Polri, maupun dalam rangka penataan dan pembe-nahan ke dalam terutama dalam upaya mewujudkan aparat penegak hukum yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa, secara sosiologis operasional diarahkan kepada tum-buhnya perhatian masyarakat, pe-ngertian dan sikap penerimaan masyarakat terhadap Kamtibmas sebagai milik seluruh Bangsa, serta mendorong bagi berkembangnya partisipasi masyarakat untuk secara swakarsa mampu mengamankan di-rinya sendiri beserta lingkungannya dari segala bentuk ancaman. Arahan ini sesuai pula dengan ru-musan GBHN 1988, yang menem-patkan partisipasi masyarakat sebagai obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Pengantar Redaksi

Didalam upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang di negara kita saat ini telah semakin banyak diwarnai oleh tindak kejahatan yang bersifat konvensional, menuntut perlu bagi para petugas Polri yang terkait untuk memiliki suatu kemampuan dan ketrampilan di dalam penguasaan serta penerapan ilmu dan teknologi Kepolisian dengan ditunjang oleh suatu tingkat penguasaan kenyataan empirik yang relatif tajam.

Dalam kaitan itulah Majalah Bhayangkara nomor 08/1989 kali ini mencoba menampilkan wajahnya yang mencerminkan upaya Polri dalam memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi agar dapat diterapkan untuk mendukung tugas-tugas Polri, khususnya dalam proses identifikasi dan penyidikan. Satu artikel yang memberikan gambaran tentang penggunaan komputer dalam sistem identifikasi sidik jari dapat anda simak pula dalam edisi ini. Disamping itu tentu masih ada artikel-artikel penting dan menarik lainnya yang ditulis oleh para senior Polri, pejabat teras Polri dan pakar bidang tertentu yang dapat anda kaji. Beberapa peristiwa penting yang terjadi dilingkungan Polri pada awal tahun anggaran 1989/1990 kami abadikan pula dalam rubrik Lintasan Peristiwa. Rubrik-rubrik lainnya seperti Lensa Kamtibmas, English Corner dan lain-lain, kami harapkan akan lebih melengkapi informasi-informasi aktual yang berguna bagi para pembaca dalam usaha mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.

Memasuki awal program Majalah Bhayangkara tahun 1989/1990 ini kami telah mengambil langkah-langkah baru guna peningkatan efisiensi organisasi majalah yang kita cintai ini. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah adanya penggantian dan penambahan pengurus majalah. Hal ini terjadi karena adanya beberapa personil yang dipindahkan tempat tugasnya ke daerah lain serta ada beberapa pengurus lama yang mendapat tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri dalam waktu yang relatif lama.

Masih dalam kaitan dengan usaha kami untuk meningkatkan efisiensi organisasi majalah Bhayangkara, salah satu kendala yang masih kami alami adalah masalah keterbatasan dana. Sehubungan dengan hal tersebut, serta menanggapi Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Ins/01/II/1988 yang isinya antara lain menginstruksikan kepada para pejabat Kepolisian Daerah untuk memiliki dan berlangganan tetap Majalah Bhayangkara, kami akan sangat bergembira dan berterima kasih apabila para pembaca berkenan mengirimkan penggantian uang cetak majalah sesuai dengan jumlah eksemplar dan waktu penerbitannya.

Semoga imbauan kami ini mendapat tanggapan yang menggembirakan dari para pembaca dan semoga sukses dalam memasuki program tahun anggaran tahun 1989/1990.

Selamat membaca.

Kebijaksanaan dan strategi tersebut yang pada tahun ini sudah menginjak pada tahun kedua dari tahap intensifikasi, di dalam pelaksanaannya terutama di dalam upaya peningkatan daya ofensif operasional Polri ternyata telah mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat akan kemampuan maupun kesanggupan Polri mengatasi gangguan-gangguan Kamtibmas yang antara lain terwujud di dalam berbagai keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Dihadapkan kepada masalah-masalah internal maupun eksternal dimasa mendatang, upaya bagi menjamin keberhasilan pelaksana tugas penegakan hukum maupun pembinaan Kamtibmas menuntut diperlukannya upaya-upaya penanggulangan yang bersifat strategis sejak dari lapis puncak atau top level di Markas Besar Polri sampai pada satuan-satuan Ujung Tombak dilapis depan. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan tugas yang akan digelar tersebut, dituntut benar-benar memenuhi tiga kriteria secara utuh dan lengkap, yaitu offensif dalam taktis, berkeahlian dalam teknis, namun juga berdampak strategis.

Sehubungan dengan hal itu, di dalam proses menggelarkan pelaksanaan tugas, tersebut terutama pada lapis depan, sebaiknya perlu dimotori dan dikendalikan oleh

Pimpinan yang memiliki sikap dan kemampuan berilmu amaliah, beramal ilmiah serta daya manajerial dan daya kepemimpinan yang relatif cukup mantap.

2. Ruang Lingkup

Sehubungan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan dan kualitas pelaksanaan tugas di atas, maka ruang lingkup materi pembahasan mencakup beberapa aspek strengths, weakness, opportunity dan threats dari pelaksanaan tugas pokok Polri itu sendiri serta cara bertindak dalam pencegahannya, meliputi:

- a. Masalah-masalah internal, terutama tentang weakness atau kelemahan di dalam tubuh Polri sendiri, di mana sepanjang pengamatan dan berbagai analisis maupun evaluasi, akan tergelar di dalam dua pokok persoalan:
 - 1). Integritas keserjanaan PTIK.
 - 2). Masalah kesatuan Polri terutama dilapis depan, yang dititik beratkan pada kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- b. Masalah-masalah eksternal, berupa beberapa masalah lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri serta bersifat potensial, terutama difokuskan kepada masalah hukum dan masalah dibidang sosial khususnya dalam bentuk beberapa faktor korelatif kriminogen.

3. Pengertian Ilmiah dan Amaliah

Kata-kata ilmiah dan amaliah

pada judul ceramah, dimaksudkan sebagai suatu deskripsi dari ciri-ciri kemampuan yang berisikan suatu penguasaan teori yang mendalam serta didukung oleh penguasaan kenyataan empirik yang tajam, serta mampu menerapkan semua penguasaan itu ke dalam upaya-upaya pemecahan masalah secara konseptual. Jelaslah kiranya apabila terhadap kualitas pemecahan masalah tersebut hanya bersifat reaksional, emosional, tidak tuntas atau fragmentaris dan lain-lain yang sekedar hanya mendasarkan pada akal sehat atau common sense, maupun sekedar merupakan reaksi inderawi belaka, maka hal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori ilmiah dan amaliah. Begitu pula apabila hanya pandai membahas masalah, menanggapi dan menganalisa di atas kertas tanpa mampu memecahkannya secara tuntas di lapangan secara komprehensif dan konseptual. Maka hal, itupun bukan tergolong ke dalam ilmiah dan amaliah. Paduan dari keduanya dalam menyusun konsep tindakan serta melaksanakannya secara berhasil yang dimaksudkan sebagai ilmiah dan amaliah, yang akan dapat diamati dari tiga kriteria pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan di muka yaitu offensif dalam taktis, berkeahlian dalam teknis namun berdampak strategis.

Offensif dalam taktis adalah suatu sikap ketanggap segera dalam mengantisipasi dan mem-

cahkan masalah, sehingga diri dan unit-unit yang dipimpinnya tidak dikendalikan oleh masalah namun sebaliknya dengan tegar mampu mengendalikan masalah yang akan dihadapi. Kualitas seperti ini lebih menampilkan cirinya sebagai suatu seni atau "ART" yang tentu tidak akan muncul begitu saja, oleh karena hal ini merupakan resutante dari berbagai kemampuan (Ability) dan kemauan (Motivation) di dalam mengantisipasi sasaran-sasaran tugas yang akan dihadapi sejak dalam bentuknya sebagai faktor-faktor potensial yang mengendap di segenap sisi kehidupan. Dengan daya offensif dalam pemecahan masalah-masalah ini tentunya diartikan sebagai mendudukkan kita pada posisi sebagai pemegang peran atau "Role Accupant" dan bahkan sebagai inti kekuatan atau "Centre Power" dari sistem Kamtibmas secara swakarsa.

Namun dengan daya offensif saja tentunya hasil yang dicapai tidaklah akan optimal, karena daya offensif itu harus didukung oleh adanya kemampuan-kemampuan teknis yang para taraf profesionalisme yang tinggi kemampuan teknis tersebut harus berkeahlian. Dengan predikat berkeahlian ini berarti harus didukung oleh ilmu dan teknologi yang memang mengambil "Subjek Matter" secara tegas pada bidang tersebut serta dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam disiplin-disiplin ilmu yang jelas. Predikat berkeahlian sebenarnya ingin

mendeskripsikan suatu kualitas yang tidak serampangan, untung-untungan atau bahkan bukan serangkaian tindakan yang dilakukan secara tidak sadar. Untuk itulah dalam penyelenggaraan bidang pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan harus dapat dilakukan secara berkeahlian, sehingga segenap sisi dari komponen fungsi-fungsi Kepolisian ini secara serentak dapat berperan di dalam mewujudkan gerak offensif di semua lini operasional.

Apabila kedua kriteria tersebut sudah terpenuhi maka tuntutan berikutnya adalah dipenuhinya kriteria ketiga yaitu bahwa semua tindakan atau action yang diambil tadi haruslah mempunyai dampak yang bernilai strategis, dalam arti bahwa hal tersebut akan menempatkan semua tindakan di tingkat mikro struktural sebagai bagian integral dari kebijakan di tingkat makro struktural. Dengan sendirinya dengan dampak strategis ini akan dapat dicapai apabila para Pimpinan dilapis depan memiliki wawasan dan tingkat intelaktual yang cukup tinggi, di mana seharusnya hal tersebut dimiliki oleh para perwira lulusan PTIK strata satu.

MASALAH-MASALAH INTERNAL

4. Integritas Kesarjanaan PTIK

Sampai saat ini masih banyak keraguan yang berkisar pada pertanyaan-pertanyaan apakah lulusan

strata satu Ilmu Kepolisian itu termasuk golongan scientist dan apakah seorang scientist itu bisa menjadi pemimpin dalam suatu satuan bersenjata seperti Polri. Pertanyaan berikutnya apakah seorang sarjana strata satu itu seorang spesialis atau generalis dan pimpinan Kepolisian itu haruskah seorang spesialis ataukah seorang generalis. Akhirnya dalam pelaksanaan tugas pun sering didiskusikan antara teori dan praktek tanpa memahami dan mendalami hakikat dan manfaat serta hubungan timbal balik antara keduanya.

Perbedaan-perbedaan persepsi tersebut bagi suatu masyarakat ilmiah memang merupakan perbendaharaan yang perlu dimiliki, namun dalam usaha memelihara dinamika bagi suatu Korps yang besar seperti Polri ini kiranya akan merupakan kendala di dalam upayanya untuk mencapai pada tingkat Efektifitas dari pelaksanaan tugas secara optimal. Sehingga apabila perbedaan persepsi ini tidak dituntaskan sangat dimungkinkan bahwa sikap-sikap skeptisisme yang tidak sehat akan muncul dan bahkan dapat menggoyahkan Integritas kesarjanaan PTIK yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Pertanyaan-pertanyaan tadi seharusnya tidak perlu timbul seandainya kita mau mensistematisir urutan berpikir tentang hubungan antara ilmu dan profesi yang memang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu profesi jelas

akan dituntut beberapa prasyarat seperti dimilikinya suatu keahlian dari suatu disiplin ilmu yang mendukungnya serta pendidikan formal bagi personil-personil yang akan mengawaki profesi tersebut. Persyaratan seperti itupun berlaku pula bagi profesi Kepolisian sehingga kemudian berkembang suatu disiplin ilmu terapan yang disebut ilmu Kepolisian dengan gelar kesarjanaannya. Dengan sendirinya seorang sarjana ilmu Kepolisian adalah seorang ahli dalam menjalankan profesinya dan sekaligus ia seorang pemimpin dari profesinya. Sebab keahlian dalam bidang profesi Kepolisian di negara kita ini telah mulai dibentuk dan dikembangkan sejak dari tingkat akademi di Akpol dan kemudian dikembangkan di PTIK. Sebab itu rumusan tugas pokok PTIK adalah pengembangan keahlian perwira Polri, mengingat keahlian untuk melaksanakan profesi Kepolisian yang dibentuk di Akpol telah dikembangkan sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan profesi Kepolisian dan sekaligus memimpinya pada lapis organisasi secara profesional.

Begitu pula dengan istilah scientist yang sebenarnya relevan untuk peneliti-peneliti di bidang eksata, kiranya menjadi tidak tepat lagi dengan suatu body of knowledge yang multi disipliner seperti Ilmu Kepolisian ini. Keahlian profesi dan memimpin profesinya jelas telah menegaskan bahwa keahliannya itu

telah mencakup keahlian memimpin dan mengelola satuan-satuan bersenjata seperti Polri ini. Dengan demikian memang strata satu PTIK adalah seorang profesional dan sekaligus pemimpin dalam profesi Kepolisian.

Hal ini sekaligus berkaitan dengan persepsi kita terhadap spesialis dan generalis di mana hal ini tentunya akan sangat tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Apabila kita mawas ke dalam atau inward looking sebenarnya strata satu masih bersifat generalis, oleh karena keahlian yang bersifat lebih khusus lagi baru akan dikembangkan pada strata dua dan strata tiga. Sedangkan apabila kita mawas ke luar atau outward looking, maka masalah Kepolisian hanyalah porsi yang kecil di tengah keseluruhan hidup bermasyarakat dan bernegara, begitu pula Ilmu Kepolisian hanyalah merupakan sebagian kecil dari keseluruhan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam konteksnya yang luas itu kita dapat menerima bahwa kesarjanaan Ilmu Kepolisian adalah merupakan spesialis.

Dengan penjelasan ini diharapkan hendaknya keragaman persepsi kita terhadap integritas kesarjanaan PTIK menjadi semakin manunggal dan selanjutnya dapat menerapkan ilmu kita ini secara lebih tegar.

5. Daya Manajerial dan Daya Kepemimpinan.

Bahwa sampai saat ini Polri

masih dihadapkan dengan masalah-masalah lemahnya daya manajerial dan daya kepemimpinan. Kedua daya tersebut memang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan dan dalam perwujudannya menjelma menjadi satu sosok kepemimpinan Kepolisian paripurna. Secara analisis memang kita dapat membedakan keduanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Fiel Marshal Viscount Slim yang disalin oleh Richard J. Allen sebagai berikut:

Leadership is of the spirit, compounded of personality and vision its practice is an art. Management is of the mind, more a matter of accurate calculations of statistic, of methods, time tables, and routine, its practice is a science. Managers are necessary, leaders are essential.

Di mana terjemahan secara bebas dapat diartikan bahwa daya kepemimpinan pada hakikatnya berwujud semangat, integritas kepribadian dan wawasan yang dalam implementasinya menjelma sebagai suatu seni. Sedangkan daya manajerial lebih merupakan daya pikir serta merupakan suatu bidang yang berisikan perhitungan-perhitungan akurat, statistik, metoda-metoda, jadwal waktu serta lebih cenderung pada kegiatan sehari-hari, sehingga dalam tindak pelaksanaannya lebih mengedepankan segi-segi penalaran. Kita memang memerlukan seorang manajer tetapi sekaligus kita juga

memerlukan seorang pemimpin sebagai suatu tuntutan yang hakiki.

Jelaslah bahwa terdapat perbedaan yang hakiki antara daya kepemimpinan dan daya manajerial ini. Namun haruslah kita ingat bahwa perbedaan tersebut hanyalah bersifat analisis saja. Sebab di dalam kenyataan di lapangan kita bahkan memerlukan suatu sosok pimpinan Kepolisian yang sekaligus memiliki kedua-duanya sebagai satu kepribadian. Tugas-tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat sungguh mensyaratkan suatu kualitas yang disebut sebagai kepemimpinan Kepolisian Paripurna yang memiliki daya kepemimpinan dan sekaligus daya managerial yang manunggal sebagai suatu pribadi.

Kualitas yang demikian ini secara mendasar haruslah mampu menampilkan ciri-ciri sebagai pemikir, pemrakarsa, penggerak dan sekaligus sebagai penanggung jawab dan penentu bagi keberhasilan tugas pokok Polri. Seorang pemimpin memiliki arti yang luas serta mencakup peranan sebagai komandan, guru, pelatih dan bapak yang senantiasa sadar dan tahu akan tanggung jawabnya serta dituntut memiliki sikap-sikap terpilih berupa keberanian, ketabahan, keahlian, kebijakan dan prakarsa, disertai kekuatan, keteguhan dan pengorbanan diri dalam pengabdian yang tulus.

Memang tugas seorang Pemimpin harus dapat diletakkan secara seim-

bang untuk mampu memenuhi kebutuhan di mana menurut John Adair dengan teori "Action centred leadership"nya dikelompokkan ke dalam tiga misi yaitu Achieving the task atau pencapaian tujuan organisasi secara optimal, building the team atau membina dan memelihara kesatuannya serta individual development atau mengembangkan kualitas setiap prajurit yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga bidang tersebut haruslah diupayakan secara seimbang dalam setiap tindakan kepemimpinan sebab apabila diabaikan salah satu bidang saja maka akan dapat mengakibatkan kepincangan kesatuan yang dipimpinnya sehingga prestasi yang optimal tidak akan tercapai. Oleh karenanya tiap-tiap pimpinan kesatuan Polri dituntut untuk mampu memainkan perannya secara lengkap baik sebagai seorang komandan yang mampu membawa kesatuannya meraih keberhasilan secara gemilang, sebagai seorang pemimpin yang dapat menjadi pola anutan di setiap perilakunya, seorang guru yang bisa mengajarkan mana yang benar, seorang pembina yang mampu mengembangkan dan membangun anggota dan kesatuannya bahkan sebagai seorang Bapak yang mampu berfungsi sebagai tempat mengadu dan berlindung bagi anak buahnya. Dalam pada itu figur sebagai pimpinan satuan Polri yang diharapkan adalah figur kepemimpinan yang lengkap,

baik sebagai pemburu kejahatan yang tangguh namun tetap ethis dalam setiap perilakunya dan selalu open terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekalipun nampaknya sepele maupun tidak akan pernah bersikap dumej sekalipun mempunyai kekuasaan.

Dengan konsepsi kepemimpinan seperti yang dijelaskan tadi, sangat diharapkan agar para perwira memiliki satu persepsi yang sama tentang kepemimpinan Kepolisian dan kemudian mengimplementasikannya secara benar dan seragam di berbagai tingkat kesatuan Polri. Hal ini berarti bahwa kehadiran para Pimpinan benar-benar merupakan kehadiran dari para "Agent of change" yang tentunya diharapkan mampu menumbuhkan iklim kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan manajemen Polri sehingga kelemahan daya kepemimpinan dan daya manajerial sebagainya disebutkan di muka dapat disempurnakan setapak demi setapak.

Dalam pada itu di tingkat kepemimpinan lapis depan saya tekankan agar berupaya memiliki empat ketrampilan kepemimpinan lapis depan atau the first line supervisor sebagai berikut:

- a. Berpikir jernih, dalam arti mampu mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih dan rasional melalui acuan-acuan serta metode-metode secara ilmiah, betapapun dilematisnya masalah-masalah yang dihadapi.

- b. Berkomunikasi efektif, dalam upaya membentuk dan menumbuhkan sikap serta daya partisipasi ke luar maupun ke dalam bagi keberhasilan penunaian embanan tugas kesatuannya.
- c. Berhitung, dimaksudkan mampu membuat perkiraan dan alternatif terhadap cara bertindak yang terbaik sehubungan dengan perhitungan atas kekuatan atau kelemahan diri sendiri dihadapkan kepada peluang dan kendala yang ada di dalam lingkungan masyarakat seperti yang saya sebutkan di muka dengan istilah S.W.O.T. yaitu strenghts, weaknesses, oportunity and threats.
- d. Bekerja sama dalam mewujudkan keterpaduan upaya, baik secara lintas fungsi maupun secara lintas sektoral sehingga mampu memelihara tingkat stabilitas Kamtibmas agar tetap mantap dan terkendali.

Keempat ketrampilan teknis kepemimpinan tadi pada dasarnya merupakan penjabaran dari cara-cara kepemimpinan yang disebut transformational leadership yang mendiskripsikan bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu mengajak seluruh unit sosial yang menjadi tanggung jawabnya untuk bekerja bersama mencapai sasaran tugas pokok. Seperti diketahui bahwa cara kepemimpinan yang disebut sebagai transformasional leadership ini merupakan salah satu dari empat cara

yang oleh Mc. Gregor Burns disebutkan terdiri dari Coersive Leadership, manipulative leadership, transactional leadership dan transformasional leadership.

Penerapan teknik-teknik kepemimpinan dengan latar belakang teori seperti yang saya sebutkan di muka dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya nanti benar-benar dapat diletakkan ke dalam kerangka penerapan manajemen operasional Polri yang baru disahkan Kapolri serta telah dilatihkan kepada para pimpinan kesatuan kewilayah-an.

Bahkan dari teknik-teknik kepemimpinan yang telah disebutkan tadi saya pun mengharapkan agar dapat memberikan isi kepada prosedur-prosedur dan mekanisme penggelaran operasi Kepolisian sebagaimana diatur dalam naskah manajemen operasional Polri tersebut.

MASALAH-MASALAH EKSTERNAL

6. Umum.

Masalah-masalah eksternal yang akan dibahas, adalah beberapa masalah yang melekat pada kondisi sosial dengan berbagai aspeknya terutama dalam bentuk yang masih potensial.

Hal ini dimaksudkan agar medan penggarapan bagi seorang ilmuwan benar-benar akan mencakup hal-hal yang lebih rumit, di mana tidak hanya terbatas dengan mengedepankan fungsi-fungsi pre-

ventif dan represif saja, akan tetapi justru akan lebih banyak mengedepankan fungsi-fungsi "Sosial engineering" yang berupa penataan-penataan terhadap kehidupan diberbagai sisi kegiatan kemasyarakatan yang nota bene selalu saja mengandung faktor-faktor korelatif kriminogen, hal mana menuntut seorang perwira sarjana untuk mampu berperan sebagai teknokrat dan sekaligus teknosof.

Sesuai dengan peran kita sebagai aparat penegak hukum dan pembina Kamtibmas maka masalah-masalah yang akan dikemukakan berkisar pada masalah-masalah dalam bidang hukum dan masalah-masalah perubahan sosial, baik yang sedang bergerak sekarang ini maupun prediksi-prediksi untuk masa-masa jauh kedepan terutama pada saat kita berada dalam era masyarakat industri.

7. Bidang Penegakan Hukum

a. Heterogenitas Perundang-Undangan

Dalam artinya yang sempit hukum sebagai undang-undang yang ada sampai saat ini sebagian besar masih merupakan peninggalan dari masa kolonial. Sebagai contoh KUHP, hukum ini masih merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda yang semula disebut "Wetboek van strafrecht" yang diperlukan di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi, serta berlaku bagi Republik Indonesia berdasarkan aturan peralihan pada

undang-undang dasar 1945. Dalam pada itu KUHP yang diberlakukan sejak tahun 1915 itupun berasal dari code penal yang disusun pada abad ke 18 dan diterapkan di negara Belanda mulai pertengahan abad ke 19, dan masih kita pakai sampai sekarang.

Contoh yang lain adalah peraturan lalu-lintas, dimana dengan Undang-Undang Nomor 3/1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya sebagai induknya, namun dalam peraturan pelaksanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan jaman penjajahan. Keadaan ini jelas akan menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum. Bisakah seorang anggota Polantas menindak kendaraan yang melaju dalam kota melebihi kecepatan 40 Km/jam? Sementara jalan itu dirancang untuk kendaraan dengan kecepatan 80 Km/jam. Atau bisakah Polri menindak orang-orang yang mempertontonkan gambar-gambar kemaluan orang dewasa di depan umum, berdasarkan pasal 534 KUHP, sementara orang itu adalah petugas KB?. Begitu pula dengan mengambil alih undang-undang negara lain (Belanda) yang telah dikembangkan berdasarkan nilai-nilai budayanya, akan menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum kepada masalah-masalah yang dilematis. Sebagai contoh rumusan tindak pidana pasal 284 KUHP tentang perzinahan jelas tidak akan dapat berlaku sepenuhnya KUHP tentang perjudian dalam

prakteknya akan berbenturan dengan adat adu ayam.

Keadan seperti ini tentunya akan menuntut daya kemampuan dan kemauan dari para perwira sekalian dalam penguasaan hukum secara lengkap, baik hukum yang tertulis maupun adat-istiadat setempat yang masih dianuti oleh masyarakat dan bahkan dirasakan sebagai suatu keadilan. Dengan demikian rakyat akan percaya bahwa kehadiran hukum memang pantas dihormati, oleh karena hukum melalui aparat penegaknya memang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

b. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum atau yang lazimnya digunakan istilah disiplin nasional, pada gilirannya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas penegakan hukum. Saya sendiri sependapat dengan Prof. DR. Soerjono Soekanto, yang menyusun tipologi ketaatan hukum dalam masyarakat. Pendapat itu setelah saya padukan dengan pengalaman tugas dapat dikenali adanya enam tipe ketaatan kepada hukum sebagai berikut:

- 1) Mereka yang patuh hukum dengan kesadaran sendiri
- 2) Mereka yang patuh hukum karena ada tekanan dari luar.
- 3) Mereka yang sengaja melawan hukum
- 4) Mereka yang merasa kebal hukum

5) Mereka yang sedang menjalani hukuman

6) Mereka yang pernah menjalani hukuman.

Keenam tipe tersebut berada di dalam masyarakat dan masing-masing tentunya memberikan pengaruh terhadap kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Berbagai pernyataan para pakar dan pejabat berwenang menyebutkan bahwa kondisi disiplin nasional dewasa ini berada dalam tingkat yang rendah. Pernyataan ini menguatkan pendapat Gunar Myrdal, seorang sosiolog yang banyak meneliti keadaan sosial di negara-negara berkembang. Dalam bukunya "The Challenge of World Poverty", Myrdal memberikan sebutan kepada negara berkembang sebagai the soft state yaitu bahwa semua negara berkembang sekalipun dengan kadar yang berlainan merupakan negara-negara yang lembek. Yang diartikan dengan lembek atau soft di sini adalah dalam arti penegakan hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang masih lemah.

Dikaitkan dengan berbagai tipe masyarakat tadi, barangkali yang paling tepat bagi masyarakat kita ini hanya sedikit saja terdapat orang-orang yang patuh hukum dengan kesadarannya sendiri sebaliknya sebagian besar terdiri dari mereka yang perlu tekanan dari luar atau mereka yang melawan hukum dan bahkan banyak pula

yang merasa kebal hukum. Dari para perwira pemahaman terhadap keadaan seperti ini hendaknya dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan, sehingga dapat dihindari kecenderungan di dalam men"generalisir" seseorang yang dapat membuat langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan menjadi tidak relevan dengan karakteristik sasaran, yang akhirnya akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana Penegakan Hukum.

Sarana dan prasarana hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pula terhadap efektivitas penegakan hukum, kalau hal ini saya kemukakan bukan berarti saya tidak memahami akan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang ada, namun setidaknya tidaknya dengan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut jelas akan mempengaruhi pula terhadap efektivitas penegakan hukum. Sebagai contoh untuk menyimpan barang bukti baik bagi kepentingan persidangan di pengadilan maupun apabila kelak harus dikembalikan kepada si pemilik harus ada ruang penyimpanan yang memenuhi persyaratan sehingga barang bukti tersebut tidak rusak.

Demikianlah banyak contoh-contoh lain yang dapat ditemui di lapangan. Namun demikian hal ini

bukan merupakan suatu alasan untuk mengambil sikap bahwa demi tegaknya hukum harus tersedia lebih dahulu sarana dan prasarana yang lengkap. Sikap seperti ini juga jelas bertentangan dengan sikap sebagai penegak hukum yang sejati, yang senantiasa dituntut kerelaannya untuk berkorban. Sikap yang harus dikembangkan adalah menertibkan administrasi penegakan hukum sehingga dengan keterbatasan sarana penegakan hukum tersebut tidak menyebabkan proses penegakan hukum justru merubah menjadi tuntutan hukum-an yang ditujukan kepada penegak hukum itu sendiri.

d. Tumpang tindihnya beberapa perundang-undangan Pidana.

Pertumbuhan jumlah undang-undang yang semenjak Orde Baru ini telah mencapai 243 undang-undang dan satu hukum pokok (KUHAP) telah membawa serta pula timbulnya dampak negatif berupa tumpang tindih/duplikasinya kewenangan dan kedudukan aparat penegak hukum. Hal ini tidak mudah untuk dapat diselesaikan secara yuridis karena masing-masing aparat tentunya akan bersandar pada keabsahan hukumnya. Keadaan seperti ini apabila tidak diatasi pada gilirannya dapat mempengaruhi bagi terjaminnya hak asasi rakyat secara optimal.

Demikianlah beberapa faktor yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hu-

kum di mana dalam upaya mengeliminir meluasnya permasalahan tersebut telah ditempuh kebijakan-kebijakan makro di tingkat Markas Besar seperti mulai dibentuknya pusat informasi kriminil nasional, upaya-upaya meningkatkan disiplin nasional, forum-forum koordinasi antara aparat penegak hukum seperti Mahkehjapol, serta penertiban ke dalam tubuh penegak hukum terutama Polri sesuai amanat GBHN untuk menciptakan sistem Kamtibmas secara swakarsa yang berintikan Polri sebagai aparat penegak hukum yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa.

8. Faktor-faktor Korelatif Kriminogen.

Masalah-masalah tersebut antara lain :

a. Adanya perubahan sosial yang pesat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak adanya perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Pada sisi lain perubahan-perubahan ini menimbulkan fenomena-fenomena sosial yang mengarah pada timbulnya disintegrasi sosial. Keadaan ini kurang menguntungkan bagi tumbuhnya daya tangkal masyarakat dan kekebalan masyarakat. Perkembangan yang pesat pada gilirannya membiakkan faktor-faktor kriminogen yang padat akan potensi-potensi perilaku penyimpangan da-

lam kehidupan masyarakat sehingga akan menjadi penghambat bagi upaya Binkamtibmas.

Dalam pada itu dengan memprediksikan perkembangan masyarakat kita yang segera akan memasuki era masyarakat industri, serta dengan memperhatikan pula akan kedudukan Polri sebagai salah satu unsur pelopor dan dinamisator pembangunan, kepada para perwira melalui penerapan ilmu dan teknologi Kepolisian masih dituntut pula untuk ikut mengeliminir berbagai kecenderungan yang timbul sebagai dampak dari suatu proses pembangunan untuk menuju masyarakat industri di mana menurut R.E. Vente dan Peter S.J. Chien dalam bukunya "Culture and Industrialization an Asian Dilemma" ada empat kecenderungan yaitu: Reifikasi, manipulasi, fragmentasi dan individualisasi. Kecenderungan Reifikasi akan mendorong bagi berkembangnya sikap kebendaan dan mengutamakan sikap lahiriah sehingga dalam rangka pembinaan Kamtibmas maka hal ini jelas akan kurang mendukung bagi upaya menumbuhkan solidaritas sosial serta partisipasi masyarakat terutama dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan. Kecenderungan manipulasi berarti merubah persepsi dari suatu realita yang sudah melembaga menjadi satu realita baru yang disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu misalnya dalam pembuat-

an iklan yang demikian pesat perkembangannya sehingga hal tersebut dapat menyuburkan konsumerisme dan mudah menyebarkan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menjurus bagi timbulnya kejahatan. Kecenderungan fragmentasi yaitu kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan masyarakat sebagai akibat semakin tajamnya spesialisasi dalam kehidupan sehingga hal tersebut dapat mengurangi daya kepekaan masyarakat terhadap kerawanan-kerawanan Kamtibmas yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah gejala individualisasi yaitu menonjolnya peranan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum yang dapat menyuburkan sikap egoisme, mau menang sendiri seperti tampak dalam kesemrawutan lalu lintas, penyerobotan tanah dan sejenisnya.

Sikap-sikap seperti tersebut di atas memang hanya disoroti dari segi negatifnya yang diperkirakan akan membawa dampak bagi tumbuhnya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, sehingga karenanya merupakan tanggung jawab dari segenap prajurit Bhayangkara untuk menggarapnya sebagaimana faktor-faktor korelatif kriminogen.

Langkah pertama tentunya harus diupayakan agar gejala-gejala tadi tidak timbul di lingkungan kedinasan Polri dan untuk itu kepada kita dituntut agar sejak dini menghayati kaidah-kaidah moral yang sudah dibakukan. Dengan mengha-

yati dan kemudian mengamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari tentulah gejala-gejala yang disebutkan di atas tidak akan mampu menggoyahkan identitas prajurit Bhayangkara sebagai Polisi pejuang yang siap mendahulukan kepentingan umum dan menomor duakan kepentingan pribadi.

Menyadari bahwa perilaku menyimpang pada dasarnya ditumbuhkan secara patologis oleh faktor-faktor kriminogen tadi, maka dalam upaya pencegahannya pun harus dilakukan melalui social policy secara menyeluruh. Baik secara nasional maupun secara lokal dengan bertumpu pada "community Based Prevention", yakni suatu pencegahan yang bertumpu pada masyarakat secara menyeluruh justru guna memperkuat mekanisme sosial kontrol di daerah setempat. Orientasi seperti tersebut di atas sejalan dengan deklarasi Caracas yang dicitakan dalam kongres PBB ke 6 tentang Crime prevention and treatment of offenders pada tahun 1980 yang antara lain menyebutkan bahwa kebijaksanaan pencegahan hendaknya dikoordinasikan dengan strategi pembangunan sosial dan ekonomi.

b. Belum berkembangnya sikap masyarakat yang security Mindedness.

Security mindedness diartikan sebagai melembaganya sikap masyarakat untuk meniadakan gangguan keamanan ataupun keselamatan

yang dapat muncul di setiap sisi kehidupannya. Dengan demikian security mindedness merupakan suatu ciri adanya daya tangkal dalam masyarakat tersebut. Sampai saat ini kita pun masih merasakan bahwa sikap security mindedness ini belum cukup berkembang, sehingga daya tangkal masyarakat pun masih perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Oleh karena itu kepada para perwira terutama unsur pimpinan Polri di lapis depan saya minta agar dalam menghadapi kondisi seperti ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bagian integral dari kiprah operasionalnya dalam membina sistem keamanan swakarsa di daerah. Upaya-upaya mengugah daya lawan masyarakat terhadap gangguan keamanan ini harus dilakukan secara teratur dan terus menerus. Sebagai contoh dalam upaya ini adalah penyelenggaraan apel para kepala pos Kamling yang diadakan secara serentak tanggal 14 Juni 1989 yang lalu adalah merupakan salah satu wujud dari upaya membangkitkan daya lawan masyarakat tersebut.

PENUTUP.

Masalah-masalah yang telah di-skripsikan di atas, jelas bukanlah merupakan masalah yang sederhana dalam pemecahannya. Mengamati serta menganalisa berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas Polri terutama di lapis depan akhir-akhir ini, adalah dikarenakan upaya-upaya pencegahan yang bersifat strategis dengan dukungan penerapan ilmu dan teknologi kepolisian yang dilandasi oleh ketekunan dan kerelaan berkorban dari segenap petugas pelaksanaannya.

Di samping memiliki wawasan yang luas, maka dengan mengungkapkan materi-materi dalam "Kepemimpinan Lapis Depan Yang Ilmiah dan Amaliah" di atas, juga dimaksudkan agar para perwira Polri terutama yang menduduki posisi sebagai unsur Pimpinan pada lapis depan dan sekaligus berperan sebagai pembantu Pimpinan pada lapis menengah, memiliki kesatuan persamaan persepsi sehingga kemudian diperoleh keseragaman dalam tindakan.

Sekian dan selamat bertugas.

(Disunting: Drs. Muhammad Zein)